

Pengaruh Manajemen Laba dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2016-2020

N. Heriyah

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Email: heryahamoy@gmail.com

Abstrak

Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, praktik penghindaraan pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia berdampak pada penurunan presentase pencapaian penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Populasi diperoleh dari 44 perusahaan dan diperoleh sampel berjumlah 12 perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020. Total sampel penelitian diperoleh 60 data laporan keuangan. Manajemen laba diukur dengan menggunakan *discretionary accruals* dan *tax avoidance* diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate*. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa secara parsial manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, kepemimpinan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan dewan komisaris berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Manajemen Laba, *Corporate Governance*, *Tax Avoidance*

Abstract

Understanding of taxes and the seriousness of taxpayers to report and pay their tax obligations can reflect the level of taxpayer awareness, tax avoidance practices carried out by companies in Indonesia have an impact on reducing the percentage of tax revenue achieved. This research aims to analyze the influence of earnings management and corporate governance on tax avoidance. The population was obtained from 44 companies and the sample obtained was 12 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2020 period. The total research sample obtained 60 financial report data. Earnings management is measured using discretionary accruals according to the Friedlan (1994) model and tax avoidance is measured using the Cash Effective Tax Rate. Multiple linear regression analysis is used to analyze the influence of the independent variable on the dependent variable. The results of this study found that earnings management partially influences tax avoidance. On the other hand, institutional leadership has no effect on tax avoidance, while the board of commissioners has an effect on tax avoidance.

Keywords: Profit Management, Corporate Governance, Tax Avoidance

1 PENDAHULUAN

Data kontribusi penerimaan pajak di sektor utama negara dimana sektor

manufaktur adalah penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak negara, yang mana sektor manufaktur menyumbang 25,89% pada tahun 2016 dan 29,13% tahun 2017 kemudian

menurun di tahun 2018 menjadi 28,34% lalu turun kembali pada tahun 2019 menjadi 27,85% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup dalam yaitu menjadi 20,8% karena adanya pandemic covid-19, oleh karena itu sektor manufaktur adalah sektor penyumbang pendapatan negara terbesar dalam Produk Domestik Bruto yang menjadi ketidaksesuaian adalah di dalam data Produk Domestik Bruto sektor manufaktur adalah penyumbang terbesar terhadap pemasukan negara tetapi dari sisi perpajakan sektor manufaktur justru mengalami tren penurunan dan belum sepenuhnya mencapai target yang ideal dalam perpajakan.

Bagi pemerintah, penerimaan pajak yang tinggi akan berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Heriyah, 2021). Salah satu penerimaan negara yang paling besar yaitu dari sektor pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi sebuah perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Karena alasan inilah wajib pajak badan perusahaan berusaha memimalkan pembayaran pajaknya dengan cara ilegal maupun legal. Usaha wajib pajak badan perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak adalah dengan cara perencanaan pajak (*tax avoidance*). Perencanaan pajak (*tax avoidance*) merupakan rekayasa penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Heriyah, 2021).

Dengan menggunakan manajemen laba untuk melakukan *income decreasing* perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak atau mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa semakin tinggi

perusahaan dalam melakukan manajemen laba yang berupa *income decreasing*, maka semakin tinggi juga perusahaan melakukan penghindaran terhadap pajak. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba disesuaikan dengan tujuannya yaitu menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi laba atau *income decreasing* sebagai bentuk penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik cenderung mengambil tindakan perpajakan yang tidak beresiko dan lebih taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan (Kurnia, 2021). Perusahaan yang menerapkan *corporate governance* sebagai bagian penting dalam usaha meningkatkan efisiensi ekonomis perusahaan, karena diharapkan dapat mengurangi biaya agensi yang diberikan perusahaan untuk menekan moral hazard yang dilakukan manajemen (Kurnia, 2021). Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* adalah teori yang berfokus pada hubungan antara organisasi atau perusahaan dan *stakeholder*. *Stakeholder* sendiri merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan.

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemilik saham, melainkan juga bagi semua *stakeholder* lainnya (Pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain) (Savitri dan Muid, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan atau organisasi sangat membutuhkan peran dari pihak luar, seperti masyarakat dan lingkungan

sekitar sehingga sebuah perusahaan sangat bergantung pada dukungan *stakeholder*-nya.

2.2 Teori Stakeholder

Definisi Pajak menurut Mardiasmo (2019):

“pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut disempurnakan menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus” nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Adapun pengertian pajak menurut Resmi, (2019), adalah:

”Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup.”

2.3 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan Pohan, (2018).

Menurut Pohan (2018), perencanaan pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

menjabarkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Cahyono dkk., 2016).

2.4 Manajemen Laba

Menurut Scott (2015), pemahaman atas manajemen laba dibagi menjadi dua diantaranya:

1. Melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan biaya-biaya politik (*opportunistic Earnings Management*).
2. Dengan memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (*Efficient Earnings Management*), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila manajer sering berusaha menonjolkan prestasinya melalui tingkat keuntungan atau laba yang dicapai (Nugroho, 2020).

3 METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020 yang

berjumlah 44 perusahaan manufaktur. Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yaitu pemilihan sampel secara tidak acak di mana harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel perusahaan adalah sebanyak 9 perusahaan dan dari 9 sampel tersebut dikalikan dengan periode 5 tahun. Jadi jumlah semua sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 45 sampel. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- Sampel merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut untuk periode 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
- Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan termasuk laporan keuangan tahunan secara lengkap dalam *website* BEI atau *website* resmi lainnya periode tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020.
- Perusahaan yang menggunakan mata uang yang rupiah dalam pelaporan keuangannya.
- Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2016- 2020.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas, uji koefisien determinasi.

3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik analisis yang digunakan ketika terdapat lebih dari satu variabel independen yang dihipotesiskan berpengaruh terhadap satu variabel dependen menurut Sugiyono, (2019). Model regresi yang dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

Y = *Tax Avoidance*

e = error

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X_1 = Manajemen Laba

X_2 = Kepemilikan Institusional

X_3 = Dewan Komisaris Independen

3.4 Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh masing- masing variabel independen (secara parsial) dalam menjelaskan varians variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian menggunakan nilai signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%.

3.5 Operasionalisasi Variabel

3.5.1 Tax avoidance

Penghindaran pajak merupakan keinginan Wajib Pajak (WP) untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, illegal maupun kedua-duanya. Adapun proksi utama yang digunakan dalam penelitian ini menurut Pohan, (2018) adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang dihitung dari:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Secara kas}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times (-1)$$

3.5.2 Manajemen Laba

Manajemen laba dapat diukur dengan menggunakan proksi *discretionary accrual* berdasarkan Model Friedlan yang merupakan pengembangan Model Healy (1985) dan Model De Angelo (1986). Model Friedlan (1994), menyatakan restriksi bahwa akrual nondiskresi stasioner antara kondisi bisnis yang berbeda. Friedlan mengasumsikan akrual nondiskresioner adalah proporsional pada aktivitas operasi yang diukur dengan *sales* (S).

$$DACpt = (TACpt / SALEpt) - (TACpd / SALEpd)$$

Keterangan :

DACpt : *Discretionary accruals* pada periode tes
TACpt : *Total accruals* pada periode tes
TACpd : *Total accruals* pada periode dasar
SALE pada : Penjualan pada periode tes
SALE pada : Penjualan pada periode dasar

3.6 Manajemen Institusioanal

Kepemilikan Institusional dihitung dengan menggunakan rasio kepemilikan saham institusional dibagi total saham yang beredar.

$$KI = \frac{\text{Saham Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

3.7 Dewan Komisaris

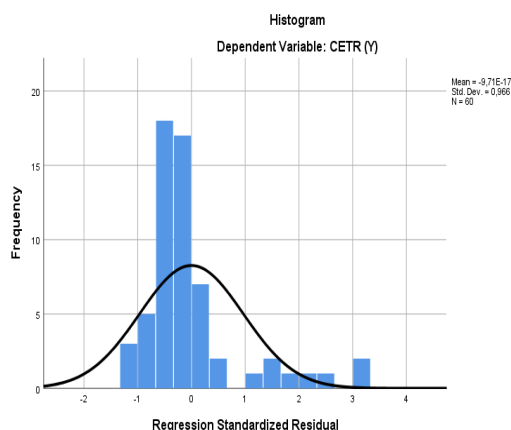
Dalam penelitian ini dewan komisaris independen diukur dengan persentase jumlah anggota dewan komisaris independen dengan jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel (Okrayanti, 2015).

$$DKI = \frac{\text{Jml Komisaris Independen}}{\text{Total Jml Komisaris}}$$

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.1 Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil uji normalitas.

Berdasarkan grafik histogram pada gambar 1 terlihat bahwa data terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak melenceng (skewness) ke kanan atau ke kiri, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

4.1.2 Uji Multikolinieritas

Dilakukannya uji multikolonieritas yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

4.1.3 Uji Autokorelasi

Dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu, pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 1. Uji Autokorelasi

Runs Test

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	-,22650
Cases < Test Value	30
Cases >= Test Value	30
Total Cases	60
Number of Runs	22
Z	-2,344
Asymp. Sig. (2-tailed)	,019

Sumber : Data diolah peneliti

4.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik scatterplots dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0

pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi hubungan antara Manajemen laba, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*.

4.2 Uji Hipotesis

4.2.1 Uji Statistik T

Uji T dilakukan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen pada tingkat signifikansi 0,5. Adapun hasil dari uji regresi secara parsial (uji t) dapat dilihat dari ke tiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, yaitu variabel manajemen laba, *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen.

Variabel yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi untuk kepemilikan institusional (KI) sebesar 0,894. variabel tersebut memiliki nilai signifikansi melebihi 0,5. Sedangkan variabel manajemen laba (DA) berpengaruh terhadap *tax avoidance* karenamemiliki nilai yang berada di bawah 0,5 yaitu sebesar 0,207. Variabel dewan komisaris independen (DKI) juga berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena memiliki nilai yang berada dibawah 0,5 yaitu sebesar 0,023.

Tabel 2. Uji Statistik t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-,019	,468		,967
	DA(X1)	-,099	,078	-,187	,207
	KI (X2)	,062	,464	,018	,894
	DKI (X3)	1,463	,626	,334	,023

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: data sekunder yang diolah

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada penelitian ini memperoleh hasil bahwa manajemen laba yang diproksikan dengan Diskresi Akrua berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dapat diartikan bahwa selama periode pengamatan, terdapat kecenderungan bahwa perusahaan melakukan *income decreasing* atau meminimalisasi laba sebagai upaya penghindaran pajak, dimana semakin besar *income decreasing* yang dilakukan oleh perusahaan maka perusahaan tersebut juga terindikasi berperilaku agresif terhadap pajak perusahaan.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2017), dan Ramdani (2021) yang menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Laba juga dapat menjadi tolak ukur untuk mengukur besarnya beban pajak perusahaan. oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba yang disesuaikan dengan tujuannya yaitu menggunakan pilihan akuntansi yang meminimalisasi laba atau *income decreasing* sebagai bentuk penghindaran pajak perusahaan.

4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji empiris menyatakan bahwa *corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil analisis regresi menunjukkan variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi sebesar 0,018 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,894. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI (tidak menerima H₂).

Kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peran penting untuk

mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku untuk mementingkan kepentingannya sendiri (Diantari 2016). Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam tindakan *tax avoidance*.

4.3.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *tax avoidance*

Hasil uji empiris menyatakan bahwa *corporate governance* dengan proksi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil analisis regresi menunjukkan variabel kepemilikan institusional memiliki koefisien regresi sebesar 0,334 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,023. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI (tidak menerima H₃).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kurniasih (2013), dan Wijayanti (2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap perilaku *tax avoidance*.

Hal ini disebabkan oleh keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan hanyalah bersifat formalitas untuk memenuhi regulasi saja sehingga keberadaan komisaris independen ini tidak untuk menjalankan fungsi monitoring yang baik dan tidak menggunakan independensinya untuk mengawasi kebijakan direksi.

5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil uji empiris yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen laba berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*

5.2 Saran

Adapun yang dapat dijadikan masukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah variabel yang memiliki keterkaitan dengan *tax avoidance*, seperti risiko perusahaan, profitabilitas dan kompensasi rugi fiskal, serta meneliti variabel *tax avoidance* dengan menggunakan *proxy* lain, seperti ETR, atau BTD.
2. Penelitian lebih lanjut diharapkan menambahkan ruang lingkup perusahaan yang berbeda untuk diteliti, seperti perusahaan perbankan, dan perusahaan pertanian yang terdaftar dalam BEI.

DAFTAR PUSTAKA

- Keown, A. J., Scott, D. F., Martin, J. D., & Petty, J. W. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Satu*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Belkaoui, A. R. (2006). *Accounting Theory Edisi 5*. Jakarta: Penerbit – Salemba Empat.
- Brigham, E. F. & Houston, J. F. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2006). *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Damayanti, F., & Susanto, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan return on assets terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 5(2), 187-206.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.

- Diantari, P. R. & Ulupui, P. R. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-32.
- Dwi, M., Sylvia, N. V., Ratna, W., Aria, F., & Edward, T. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2010). The effects of executives on corporate tax avoidance. *The accounting review*, 85(4), 1163-1189.
- Halimi, F., & Waluyo, W. (2019). Pengaruh tax avoidance, penerapan sanksi pajak dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 302-312.
- Kurnia, R., L. (2021). *Good Corporate Governance (GCG) dan Komite Audit*. Zurra Infigro Media.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Cv Andi Offser
- Nugroho, P. I. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 243-255.
- Pohan, H. T. (2008). Pengaruh good corporate governance, rasio tobin'sq, perata laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*.